

BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA KOREA UTARA DENGAN KOREA SELATAN DI DISTRIK KAESONG

Berjalannya kegiatan di Kaesong merupakan sebuah keberhasilan dari proyek yang telah lama diinginkan oleh Semenanjung Korea. Sejak awal dimulai kegiatan dalam *Kaesong Industrial Complex* (KIC) sendiri telah memberikan banyak keuntungan bagi kedua Korea. Bagi pihak Utara, kegiatan produksi ini memberikan keuntungan ekonomi bagi negaranya. Produksi tersebut menambah pendapatan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-Il, dan pendapatan tersebut juga mempengaruhi dana untuk bidang militer serta kaum elite Utara. Keuntungan bagi Selatan sendiri merupakan keuntungan dalam bidang politik dan juga ekonomi. Dalam bidang ekonomi dimana semenjak tahun 2003 sampai 2007 kawasan ini telah memberikan nilai tambah sebesar USD 1,4 miliar kepada ekonomi Korea Selatan. Kemudian dalam bidang politik, berupa adanya penyebaran nilai-nilai liberal demokrasi dan kapitalisme kepada warga Korea Utara. Dengan adanya kerjasama antar Korea maka komunikasi dan interaksi antar masyarakat Utara dan Selatan akan terjalin ditengah kegiatan di Kaesong. Hal tersebut memungkinkan untuk para pekerja saling membaaur, dan tentu saja dengan bekerja secara bersama buruh atau tenaga kerja yang bekerja dalam produksi di KIC akan secara tidak langsung terlihat keunggulan dari sistem kapitalisme dan demokrasi dari Korea Selatan dibandingkan sistem komunisme dan sistem politik otoriter Korea Utara.

Keunggulan lain yang diperoleh Korea Selatan ada dalam bidang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Karena KIC sendiri menawarkan upah buruh yang murah, dan jam kerja yang lebih banyak dibanding buruh Negara lain. Hal tersebut membuat perusahaan dapat menekan biaya operasional untuk pekerja serta mendapat untung lebih dari usahanya di Negara lain. Keuntungan-keuntungan ini jelas menarik pengusaha lain untuk ikut terjun kedalam Industri Kaesong.

Disisi lain, Kompleks Industri Kaesong dan keterlibatan proyek ekonomi di Korea Utara tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari politik, mengingat adanya sifat politis dari hubungan antara kedua Korea. Melihat kembali pengalaman periode awal Unifikasi Korea yang tidak menghasilkan adanya pencapaian penyatuan politik antara kedua Korea dikarenakan adanya perbedaan format unifikasi yang ingin dicapai. Hal seperti ini terulang kembali dalam proses Integrasi Korea dalam kerjasama Kawasan Industri Kaesong ini, Korea Utara dengan kepentingan nasionalnya tetap mempertahankan ideologi komunisme menginginkan format Konfederasi (satu Bangsa Korea dengan dua sistem politik dan juga ekonomi), sedangkan dari pihak Korea Selatan menginginkan format dengan negara kesatuan yang memiliki satu sistem politik maupun ekonomi.¹ Proses Integrasi yang diawali dengan kerjasama pembangunan Kawasan Industri Kaesong antara Korea Selatan dengan Korea Utara tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dilihat dari masih adanya permasalahan-permasalahan yang juga memberikan dampak terhadap penutupan kegiatan di KIC.

¹ Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 19

Penutupan kegiatan di distrik Kaesong merupakan keputusan yang tidak terduga, mengingat dampak positif yang diberikan Kaesong kepada kedua Korea. Penutupan Kaesong juga merupakan hal yang sangat disayangkan, mengingat kedua belah pihak sebelumnya tidak pernah membiarkan situasi krisis hubungan apapun mempengaruhi kawasan Kaesong. Namun, tidak bisa dihindari, permasalahan antar kedua Korea pada akhirnya mempengaruhi kegiatan Kaesong. Semakin meningkatnya permasalahan di Semenanjung Korea ini dapat dilihat dari adanya kasus penutupan Industri Kaesong pada masa pemerintahan presiden Park tahun 2013, dan 2016.

A. Pemutusan Hubungan Kerjasama Antara Korea Utara Dengan Korea Selatan Di Distrik Kaesong Tahun 2013

Maret 2013 Ketegangan di Semenanjung Korea kian meningkat setelah Korea Utara menyatakan "dalam kondisi perang" dengan Korea Selatan. Perselisihan dan konfrontasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut akhirnya kembali mencuat dan banyak mendapat perhatian publik. Awal mula pemicunya adalah adanya kompetisi militer diantara kedua negara. Korea Utara sendiri sering melakukan ujicoba rudal yang dikecam oleh banyak Negara termasuk oleh Negara maju seperti Amerika. Kekuatan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara memang sudah sejak dulu dikecam oleh negara lain, karena nuklir sendiri dianggap sebagai senjata yang dapat mengancam keamanan suatu Negara.

Program nuklir Korea Utara awalnya dimulai pada akhir tahun 1950-an, dan Korut memulai proyek pengembangan nuklir pertama kali pada tahun 1986. Saat itu Korut memulai pengoperasian reaktor nuklir lima megawatt di Yongbyon setelah selama tujuh tahun melakukan konstruksi dengan bantuan Uni Soviet.² Program nuklir ini menggunakan tenaga kerja dari warga negaranya dan menggunakan pasokan teknologi dari luar negeri untuk membangun reaktor nuklir kecil berukuran 5 MWE di Yongbyon. Saat itu Korea Utara telah mampu memproduksi 6kg plutonium pertahun.³ Setahun berikutnya satelit Amerika Serikat mendeteksi adanya uji coba ledakan dan rencana baru untuk memisahkan plutonium dari reaktor.

Melihat adanya ancaman nuklir dari pihak Korea Utara, gabungan dari 6 negara besar kemudian berkumpul dan membentuk *six party talks* untuk merundingkan nasib nuklir milik korea utara. Pada tahun 1993, Korut mengancam akan mundur dari perjanjian proliferasi nuklir, tetapi kemudian menundanya. Selang setahun kemudian, Korut dan Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian di mana Pyongyang menutup reaktor nuklir berbasis plutonium Yongbyong dengan imbalan bantuan pembangunan dua reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Pada Januari 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian nonproliferasi nuklir. Pada bulan Agustus Korut bergabung dalam putaran pertama perundingan nuklir enam negara di

² international.sindonews.com. "Sejarah Nuklir Korut, Dari Pembangkit Listrik Menjadi Senjata" diakses pada tanggal 5 Maret 2017. Melalui laman <https://international.sindonews.com/read/1138254/41/sejarah-nuklir-korut-dari-pembangkit-listrik-menjadi-senjata-1473474477>

³ Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 7

Beijing, yang meliputi China, Jepang, Rusia, Korea Selatan (Korsel) dan AS. Selang dua tahun kemudian atau 2005, Korut mengumumkan telah memiliki senjata nuklir dan selang satu tahun kemudian atau 2006, negara komunis itu melakukan uji coba nuklir bawah tanah.

Pada tingkat geopolitik, Kaesong sendiri merupakan salah satu bagian dari kebuntuan antara DPRK dan Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia, atas program senjata nuklir Korea Utara, dan pada tahun 2008 perundingan enam pihak dibatalkan, dan Korea Utara mengeporasikan kembali reaktor 5MWE dan secara terbuka mengumumkan pengayaan uranium untuk kepentingan militer dan pembangunan reaktor light water yang diperkirakan membuat Korea Utara mampu memproduksi plutonium yang telah dipisahkan sebanyak 30 sampai 50kg sehingga cukup untuk setengah lusin senjata nuklir.⁴ Perkembangan nuklir Korea Utara masih terus berlanjut hingga tahun 2009 Korea Utara menyatakan bahwa tahun itu merupakan kali kedua Korea Utara telah berhasil mengadakan uji coba bom atom. Dengan adanya uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, komunitas internasional terus berupaya untuk mencegah kelanjutan program nuklir Korea Utara. April 2012 Korea Utara mengubah konstitusinya. Sejak itu, negara tersebut menyebut diri secara resmi sebagai “Bangsa Bersenjata Nuklir”.⁵ Korea Utara memang erat kaitannya dengan kekuatan nuklir yang dimilikinya. Sehingga isu nuklir yang dimiliki Korea

⁴ Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 8

⁵ www.dw.com, “Korea Utara: Miskin, Berbahaya dan Punya Senjata Nuklir” Diakses pada tanggal 16 Maret 2017. Diakses melalui laman <http://www.dw.com/id/korea-utara-miskin-berbahaya-dan-punya-senjata-nuklir/a-16595936>

Utara ini merupakan kasus yang serius bagi keamanan negara tetangganya, Korea Selatan. Hingga isu tersebut berkembang dan mempengaruhi hubungan yang ada di Semenanjung Korea semakin memanas. Puncak hubungan damai di semenanjung Korea terjadi pada tahun 2013, dimana uji coba nuklir ketiga oleh Korea Utara dilakukan yang secara langsung melanggar Resolusi PBB 1718 tahun 2006, 1874 tahun 2009, dan Resolusi 2078 2013 yang sebelumnya sudah diberikan sebagai peringatan nuklir untuk Korea Utara.

Dengan adanya uji coba nuklir ketiga oleh Korea Utara, hal ini membuat pihak Korea Selatan maupun dunia Internasional harus berupaya tegas terhadap Pyongyang, Dengan uji coba tersebut, DK PBB dengan tegas mengeluarkan sanksi dalam Resolusi 2094 pada tanggal 7 Maret 2013 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Senjata Pemusnah Masal dan teknologi misil balistik.⁶ Sanksi dari PBB ini bekerja dalam tiga ranah yang semuanya berujung pada penghambatan perkembangan program nuklir Korea Utara, berupa: pertama, yang berhubungan dengan barang-barang khusus. Kedua, menargetkan kepada entitas dan individu seperti pembekuan aset dan larangan berkunjung. Ketiga mewaspadaai transaksi keuangan.⁷

Upaya dari Korea Selatan dan Amerika pun ikut dilakukan. Dengan adanya ancaman nuklir Korea Utara, pada tanggal 11 Maret 2013 kedua negara yang bersekutu ini melakukan latihan gabungan militer dengan skala

⁶ Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 9

⁷ IISS Workshop Report, (2013) *UN Sanctions on North Korea: Prospects and Problem*, Dubai. Halaman 2.

besar-besaran, latihan yang di beri nama sandi “Key Resolve” itu akan berlangsung hingga 21 Maret 2013 dan melibatkan 10.000 tentara Korea selatan dan 3.000 pasukan Amerika Serikat.⁸

Latihan gabungan Korea Selatan dan AS yang dilakukan secara terang-terangan dianggap sebagai ancaman invasi oleh pihak Korea Utara. Kedekatan antara Korea Selatan dan Amerika dan kerjasama militer yang dianggap Korea Utara dapat membahayakan negaranya. Adanya ancaman bagi Korea Utara ini membuat situasi di Semenanjung Korea menjadi tegang. Ketegangan ini telah menyebabkan Korea Utara, yang dipimpin oleh Kim Jong-un, membuat keputusan kebijakan untuk menutup Kawasan Industri Kaesong yang merupakan industri hasil kerjasama Korea Utara dan Korea Selatan pada 3 April 2013. Penutupan Kaesong ini merupakan reaksi keras atas kebuntuan sikap terhadap Washington dan Seoul yang telah menggelar latihan perang bersama di Semenanjung Korea selama sebulan.⁹

Presiden Park, yang dilantik pada akhir Februari, menggambarkan langkah itu sebagai tindakan yang sangat mengecewakan dan memperingatkan Korea Utara bahwa tindakan tersebut akan berdampak pada kepercayaan para calon investor. Pihak Pyongyang telah marah dengan pernyataan Menteri Pertahanan Kim Kwan-Jin bahwa Korea Selatan memiliki rencana kontingensi "militer" untuk menjamin keamanan

⁸ web.inilah.co, “AS-Korsel lakukan Latgab, Korut Siap Membalas”, diakses pada tanggal , pada 15 Maret 2017. Melalui laman <http://web.inilah.com/read/detail/1966748/as-korsel-lakukan-latgab-korut-siap-membalas#.Ua8KcdjCeWZ>

⁹ tempo.co, “Korea Utara Tutup Kawasan Industri Kaesong”, diakses pada 16 Maret 2017. diakses melalui laman <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/03/118470974/Korea-Utara-Tutup-Kawasan-Industri-Kaesong>.

rakyatnya yang bekerja di zona. Ia (Pyongyang) juga marah terhadap media Korea Selatan dan para analis yang mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan berani menutup Kaesong yang menjadi sumber penting devisa negara.¹⁰ Menurut pengamat urusan Korea Utara, pihaknya tidak dapat mencegah kemungkinan Korea Utara untuk mengambil tindakan ekstrim dalam hubungannya dengan Korea Selatan, meskipun ada pandangan lain, bahwa Korea Utara sulit untuk menghentikan Proyek Kompleks Industri Korea Selatan di kota Kaesong Korea Utara, yang selama ini berperan sebagai simbol pembukaan pintu Korea Utara terhadap dunia luar.

Pemutusan hubungan dan penutupan Kawasan Industri Kaesong benar-benar dilakukan oleh pihak Utara, hal ini diawali dengan pihak Korea Utara yang memutus jalur komunikasi militer dengan Korea Selatan, pada 27 Maret 2013. Korea Utara juga menuduh Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye, mengikuti kebijakan gariskeras seperti pendahulunya Lee Myung Bak yang disebut Pyongyang sebagai penyebab berkepanjangan ketegangan antarKorea. Pada 5 April 2013, penguasa Korea Utara Kim Jong Un memberikan pernyataan terkait Kaesong bahwa jika Selatan benar-benar khawatir tentang masa depan Kaesong, mereka harus mengambil sikap untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan dan provokasi militer.¹¹

¹⁰ medanbisnisdaily.com, “Korut Salahkan Pemimpin Korsel untuk Penutupan Kaesong” diakses pada 17 Maret 2017. melalui laman <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/04/12/23120/korut-salahkan-pemimpin-korsel-untuk-penutupan-kaesong/>

¹¹ international.sindonews.com, “Korut: Jika ingin pulihkan Kaesong, hentikan provokasi militer”, diakses pada 16 Maret 2017. Diakses melalui laman <http://international.sindonews.com/read/2013/05/05/40/745446/korut-jika-ingin-pulihkan-kaesong-hentikan-provokasi-militer>

Dengan adanya pernyataan dari Korea Utara tersebut, muncul keputusan Korea Utara pada 3 April 2013 yang melarang para manajer, pekerja dan truk-truk yang datang dari Korea Selatan untuk masuk ke kawasan Industri Kaesong. Selain itu, Korea Utara juga menarik 53.000 pekerjanya dari Kawasan Industri tersebut. Hal merupakan suatu tindakan yang menambah ketegangan di Semenanjung Korea, khususnya pada distrik Kaesong. Kebijakan dari Korea Utara ini belum memiliki kejelasan, sampai kapan pihaknya akan melarang para pekerja Korea Selatan untuk memasuki kawasan Kaesong.

Ditengah ketegangan paska uji nuklir ketiga Korea Utara bulan Mei lalu dan keluarnya sanksi PBB, Korea Utara telah menutup hotline Palang Merah dengan Korea Selatan dan jalur komunikasinya dengan Komando militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Pemutusan hotline militer yang dilakukan oleh Korea Utara dianggap lebih berdampak serius oleh Korea Selatan. Sebab, kedua negara ini telah menggunakan empat saluran telepon untuk mengontrol lalu lintas pekerja dan kargo yang setiap hari melintas ke Kaesong.¹² Adanya pemutusan jalur komunikasi militer yang dilakukan oleh Korea Utara berdampak besar bagi prospek kegiatan Kompleks Industri Korea Selatan di kota Kaesong. Sikap keras Korea Utara tersebut yang semakin meningkatkan ketegangan antarKorea. Selain itu, Korea Utara tetap menganggap kegiatan organisasi sosial Korea Selatan yang giat menyebarkan selebaran anti kediktatoran pemimpin tertinggi Kim Jong

¹² Nypost.com, "North Korea cuts last military hotline with Seoul" diakses pada 12 Maret 2017. Melalui laman <http://nypost.com/2013/03/27/north-korea-cuts-last-military-hotline-with-seoul>

Il lewat udara kepada masyarakat Korea Utara, sebagai suatu aksi yang mencoba menggulingkan pemerintahan Korea Utara. Dari tindakan Korea Selatan ini, pihak Pyongyang merasa harus menegaskan Korea Selatan agar tidak melanjutkan aksinya tersebut. Korea Utara ingin lebih tegas dengan negara tetangganya tentang kepemimpinannya tersebut. Oleh karena itu, pihak Korea Utara pada akhirnya mengorbankan industri Kaesong untuk mempertahankan pemerintahan mereka.

Kerugian yang didapat oleh kedua Korea dengan adanya penutupan kawasan industri ini cukup berat bagi kedua belah pihak. Bagi Korea Utara, apabila Kaesong ditutup maka tenaga kerjanya akan kehilangan upah. Dengan kata lain Pyongyang akan kehilangan pendapatan valuta asing dari kompleks industri Kaesong. Sedangkan bagi pihak Seoul, kerugian perusahaan swasta Korea Selatan yang sedang beroperasi di kompleks Kaesong jauh lebih parah. Karena pihak perusahaan Korea Selatan sendiri telah menanam modal sebesar 380 milyar won, termasuk pembayaran biaya sewa tanah, biaya konstruksi pabrik, dan biaya penyediaan fasilitas produksi, serta kerugian penjualan produk Korea Selatan. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan juga telah mengeluarkan biaya sekitar 120 milyar won untuk membangun infrastruktur di Kompleks Industri Korea Selatan di kota Kaesong Korea Utara.

Setelah penutupan, kubu Utara terus-menerus mengeluarkan retorika perang hingga berbulan-bulan. Hingga pada Juni 2013, ketegangan di Semenanjung Korea pun akhirnya menurun. Penurunan ketegangan

kawasan ini diawali dengan sikap Korea Utara yang memberikan pernyataan untuk mengadakan perundingan. Korea Utara mengusulkan perundingan resmi dengan kubu Selatan tentang normalisasi proyek komersial setelah beberapa pekan kawasan industri bersama Kaesong ditutup.¹³ Korea Utara juga mengatakan bahwa jalur komunikasi langsung antar dua negara yang sempat putus akan disambung kembali jika pihak Selatan setuju berunding. Usulan dari Korea Utara ini disambut baik oleh pihak Korea Selatan. Normalisasi kompleks industri Kaesong disepakati kedua Negara dengan mengadakan pertemuan dan pembicaraan di Panmunjom, di kompleks DMZ. Keduanya sepakat untuk membahas pembukaan kembali kawasan dan pemeriksaan fasilitas yang ada.¹⁴ Setelah berminggu-minggu negosiasi yang bertujuan meredakan ketegangan, puluhan mobil, truk dan staf manajemen menyeberangi perbatasan. Suasana ketegangan di semenanjung menurun secara signifikan, meski kecemasan tentang ambisi nuklir Korea Utara masih ada hingga kini.

Upaya lain juga diusulkan oleh Korea Selatan. Upaya menarik investor asing telah disepakati selama masa negosiasi pembukaan Kaesong. Upaya ini diusulkan oleh Korea Selatan karena pihak Korea Selatan percaya jika kepentingan dari luar semenanjung terlibat dalam proyek Kaesong maka itu akan membuat Pyongyang menjadi lebih sulit untuk menutup

¹³ [bbc.com](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130606_northkaesongtalk), "Korea Utara usulkan pembukaan Kaesong" diakses pada 17 Maret 2017. Melalui laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130606_northkaesongtalk

¹⁴ [Bbc.com](http://bbc.com/indonesia/majalah/2013/09/130902_bisnis_kaesong), "Korea mulai bicarakan industri Kaesong" diakses pada 17 Maret 2017. Melalui laman http://bbc.com/indonesia/majalah/2013/09/130902_bisnis_kaesong

kawasan industri bersama itu di kemudian hari jika hubungan Utara-Selatan di masa mendatang kembali pada situasi seperti periode sekarang.

B. Pemutusan Hubungan Kerjasama Antara Korea Utara Dengan Korea Selatan Di Distrik Kaesong Tahun 2016

Penutupan Kawasan Industri Kaesong kembali menjadi isu yang tidak terduga bagi berbagai pihak. Penutupan Kaesong ini kembali terjadi seperti pada tahun 2013. Kaesong yang saat itu berhasil dibuka kembali, kemudian mengalami permasalahan yang sama memasuki awal tahun 2016. Penghentian operasi pabrik-pabrik Korsel di kawasan industri Korut di Kaesong itu merupakan sinyal buruk bagi hubungan kedua negara.

Korea Selatan dibawah pemerintah Park Geun Hye mengambil langkah tegas terhadap Korea Utara dengan mengorbankan Industri yang sudah lebih dari dua dekade di jalankan oleh kedua negara ini. Keputusan penutupan ini di laksanakan pada Kamis 11 Februari 2016. Korea Selatan membuat kebijakan penutupan dengan menarik pulang para pekerja industri Korea Selatan yang bekerja di Kaesong. Penarikan para pekerja korea selatan dilakukan setelah beberapa perusahaan yang berdisri di KIC ditutup sementara. Menteri Unifikasi Korea Selatan Hong Yong-pyo mengatakan sekitar 130 warga Korea Selatan rencananya masuk ke Kaesong pada Kamis, 11 Februari 2016, untuk memulai penutupan perusahaannya di sana. Dia meneruskan, sekitar 70 warga Korea Selatan yang tinggal di sana akan

segera pulang.¹⁵ Belum diketahui dengan jelas akan berapa lama penutupan Komplek Industri ini akan berlangsung. Penutupan yang dilakukan oleh Korea selatan ini merupakan salah satu sikap keras yang diambil oleh Korea Selatan sebagai tindakan hukuman atas peluncuran roket Korea Utara yang diduga juga disertai dengan misil nuklir.

Kejadian kasus penutupan Kaesong tahun 2016 memang memiliki permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya program nuklir Korea Utara yang terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan adanya uji coba nuklir yang tentunya akan terus dilakukan oleh pihak Korea Utara. Korea Utara sendiri melakukan uji coba nuklir pada 6 Januari dan pada 7 Februari dilanjutkan dengan meluncurkan satelit. Dan pada 8 Februari 2016, Korea Utara meluncurkan sebuah roket ke angkasa sebagai uji coba teknologi misil balistik. Peluncuran misil ini bukan kali pertama bagi Korea Utara. Dan dengan adanya peluncuran misil tersebut, Korea Utara telah melakukan pelanggaran konvensi PBB.

Korea Selatan dibawah pemerintahan Park Geun Hye kemudian menuntut PBB untuk memberikan sanksi khusus bagi sikap provokatif Korea Utara yang tentu saja mengancam keamanan dunia luar. Menanggapi sikap Korea Utara, AS melakukan kerjasama dengan Cina yang memiliki hubungan erat dengan Korea Utara untuk menyelesaikan kasus nuklir di Semenanjung Korea. AS membujuk Cina untuk menyetujui sanksi yang

¹⁵ Cnnindonesia.com, “Hubuangan memburuk, Korsel Tutup Pabrik di Korut” diakses pada 18 Maret 2017. Melalui laman <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-110329/Hubuangan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut>

akan diberikan untuk Korea Utara. Namun, sanksi tersebut pada awalnya di tentang oleh Cina, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran Cina akan reaksi dramatis yang nantinya akan di tunjukan oleh Pemerintah Pyongyang dan berdampak pada situasi di semenanjung Korea yang nantinya akan semakin tidak terkendali. Melalui pertemuan dua Negara ini, AS dan Cina mengatakan bahwa mereka memiliki keinginan yang sama untuk mebebaskan Semenanjung Korea dari nuklir. Cina sendiri tengah berupaya untuk menyepakati adanya sanksi untuk Korut dengan harapan sanksi tersebut dapat menghalangi aksi seperti uji coba nuklir yang meningkatkan ketegangan dan melanggar aturan internasional agar tidak terulang kembali.¹⁶

Meskipun sebelumnya Amerika Serikat membutuhkan waktu lama untuk membujuk Cina agar bersedia untuk menyetujui sanksi terhadap Korea Utara, namun pada akhirnya Cina menyetujui Sanksi yang akan di berikan terhadap Pyongyang. 15 perwakilan Dewan Keamanan PBB kemudian menyepakati adanya sanksi bagi Korea Utara. Hingga akhirnya pada 2 Maret 2016, Dewan Keamanan PBB secara bulat mendukung draf resolusi pemberian sanksi kepada Korea Utara. Sejumlah diplomat mengungkapkan, sanksi yang terdapat dalam resolusi itu merupakan terberat yang pernah diberikan kepada Korea Utara. Seperti dikutip dari Reuters, dua

¹⁶ Antaranews.com, "Obama dan Park janjikan hukuman tegas bagi Korea Utara", diakses pada 18 Maret 2017. Melalui laman <http://m.antaranews.com/amp/berita/538745/obama-park-janjikan-hukuman-tegas-bagi-korea-utara>

diplomata mengungkapkan, sanksi terhadap Korea Utara lebih berat daripada sanksi yang diberikan PBB kepada Iran.¹⁷

Sanksi yang diberikan PBB terhadap Korea Utara memiliki 8 point yang dimuat dalam resolusi yang disahkan kemarin oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu:¹⁸

1. Semua kargo yang akan berangkat dari dan ke Korea Utara mulai sekarang harus diinspeksi atau diteliti. Sebelumnya, hanya barang-barang yang dilarang dikapalkan ke dan dari Korea Utara yang diperiksa.
2. Perwakilan perdagangan Korea Utara di Suriah, Iran, dan Vietnam masuk dalam daftar hitam PBB bersama 16 nama lainnya. Di dalam daftar itu termasuk 12 lembaga milik warga Korea Utara. Mereka terkait dengan program senjata pemerintah Korea Utara.
3. Korea Utara dilarang mengimpor dan mengekspor semua jenis senjata.
4. Daftar barang-barang mewah yang dilarang masuk ke Korea Utara oleh Dewan Keamanan diperluas termasuk jam tangan mewah, kendaraan rekreasi air, mobil salju yang harganya lebih dari US\$ 2.000 atau Rp 26,5 juta, produk kristal, dan peralatan olah raga dan rekreasi.
5. Larangan mengubah sejumlah produk yang memiliki kemampuan secara langsung dioperasikan untuk kegiatan pasukan bersenjata Korea Utara. Misalnya truk yang dapat dimodifikasi untuk tujuan militer. Larangan ini baru pertama kali terjadi dan diberlakukan pada Korea Utara.

¹⁷ m.tempo.co “Ini 8 Jenis Sanksi Terberat PBB untuk Korea Utara” diakses pada 18 Maret 2017. Melalui laman <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/118750228/ini-8-jenis-sanksi-terberat-pbb-untuk-korea-utara>

¹⁸ *Ibid.*

6. PBB memasukkan 31 perusahaan perkapalan Korea Utara (Ocean Maritime Management Company - OMM) dalam daftar hitam.
7. Badan Pengembangan Dirgantara Nasional atau NADA yang bertanggungjawab saat peluncuran roket Februari lalu masuk dalam daftar sanksi PBB.
8. Daftar hitam baru dibuat untuk sejumlah nama termasuk pejabat senior Korea Utara yang terlibat dalam program peluncuran rudal jarak jauh, beberapa pejabat senior NADA, pejabat Tanchon Commercial Bank di Suriah dan Vietnam, dan perwakilan Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) di Suriah dan Iran.

Selain 8 sanksi yang diberikan, PBB juga memberikan sanksi ekonomi dan perdagangan kepada Korea Utara. Sanksi tersebut menyebutkan bahwa, badan dunia itu juga membatasi ekspor batu bara, bijih besi atau mineral lain dari Korea Utara dan melarang penjualan bahan bakar pesawat terbang dan roket ke negara tersebut. PBB juga membatasi transaksi keuangan oleh bank-bank Korea Utara dan melarang semua penerbangan yang diindikasikan membawa barang seludupan ke Pyongyang.¹⁹

Dengan sanksi yang sudah diberikan oleh PBB, Korea Utara menanggapi sanksi tersebut dengan menembakkan enam peluru kendali atau roket ke arah semenanjung Korea. Langkah Korea Utara tersebut merupakan sebuah protes Korut terhadap keputusan PBB atas sanksi yang dijatuhkan kepada Korut. Melihat reaksi Pyongyang tersebut seakan sanksi yang dijatuhkan terhadap negara tersebut tidak berhasil membuat Korea

¹⁹ *Ibid.*

Utara jera. Korea Utara selalu memiliki langkah untuk melawan tekanan Internasional terhadap Negaranya. Korea Utara melalui Juru bicara Komisi Pertahanan Nasional (NDC) mengatakan, sanksi terbaru PBB terhadap Pyongyang atas program senjata nuklirnya ketinggalan zaman dan tak ubahnya tindakan bunuh diri. Sanksi itu bisa memicu serangan nuklir ke daratan Amerika Serikat.²⁰

Melihat respon Korea Utara atas sanksi PBB, hal inilah yang mendasari Korea Selatan untuk melakukan kebijakan penutupan Industri Kaesong. Dengan penutupan Kaesong ini, Korea Utara menyatakan kemarahannya dengan mengusir pekerja Korea Selatan dari Kawasan Kaesong dan membekukan aset dari 124 perusahaan yang ada di Kaesong. Tindakan provokatif Korea Utara berlanjut pada pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Korea Utara bahwa pihaknya telah memerintahkan militernya untuk memasuki dan mengambil alih kawasan Industri Kaesong sehari setelah adanya pengusiran terhadap pekerja Korea Selatan. Sehingga kini Kawasan yang awalnya dibangun untuk wilayah kerjasama industri di Semenanjung Korea beralih fungsi sebagai kawasan militer Korea Utara. Menanggapi keputusan pihak Korea Utara, Korea Selatan memilih langkah untuk memotong pasokan listrik dan air ke kawasan industri Kaesong, yang sebelumnya [dinyatakan sebagai kawasan militer oleh Korea Utara](#). Kebijakan Korea Selatan ini pun berdampak kepada kelangsungan hidup

²⁰ international.sindonews.com, “Korut Sebut Sanksi PBB Ketinggalan Zaman” diakses pada 18 Maret 2017. Melalui laman <https://international.sindonews.com/read/1098177/40/korut-sebut-sanksi-pbb-ketinggalan-zaman-1459763905>

masyarakat di Kaesong. Selama ini sekitar 17 ribu ton air di alirkan oleh Korea Selatan ke Kawasan Kaesong, yang penggunaan setiap harinya sebanyak 7 ribu ton air digunakan untuk kawasan industri. Sisanya yakni 10 ribu ton air dinikmati warga sekitar. Dengan dihentikannya pasokan listrik dan air ini membuat warga Kaesong menjadi korban atas konflik dua negara ini. Selain terhadap masyarakat di Kaesong, penutupan Kaesong juga membawa dampak terhadap pengusaha Korea Selatan dan para pekerja Korea Utara yang bekerja di Industri Kaesong.

Penutupan oleh pihak Selatan ini juga didasari pada perjanjian reunifikasi yang telah disetujui oleh kedua Korea. Yang mana pada isi perjanjian reunifikasi pada masa pemerintahan Park Geun Hye, kedua korea sepakat untuk menghilangkan adanya ancaman nuklir di Semenanjung Korea. Namun, dengan sikap Korea Utara pada awal tahun 2016, telah melanggar upaya reunifikasi tersebut. Sehingga membuat Korea Selatan perlu untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap Korea Utara mengingat ketidakefektifan sanksi yang sebelumnya sudah diberikan oleh PBB. Langkah ini juga di pertegas oleh pihak Selatan untuk menekan pemasukan Korea Utara. Yang diharapkan dengan hilangnya sekitar 22% pemasukan Korea Utara, maka biaya yang diperoleh Korea Utara akan berkurang sehingga hal ini berdampak pada program Nuklir Korea Utara yang selama ini menjadi ancaman bagi dunia luar. Melihat situasi yang semakin tegang, dunia pun kini mulai mengamati dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya pada Semenanjung Korea. Hingga kini, kasus Kaesong belum

menemukan titik terang. Dengan adanya langkah penutupan Kaesong ini juga menandakan berakhirnya satu-satunya kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan setelah Perang Korea pada tahun 1950-1953.